

KELEMBAGAAN PENDIDIKAN

EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Paulus Satyo Istandar Tan¹

¹STPK Santo Yohanes Rasul
Yabansai, Kec. Heram, Kota
Jayapura, Indonesia
wiamapi@yahoo.co.uk

ABSTRACT

One factor that greatly affects the quality of education delivery is the organization or institution of education delivery. This problem has implications for ineffective and inefficient education management processes. The research method used is a qualitative description method by collecting library data, reading and recording and processing research materials. Education is the whole praxis of life and processes of events accompanied by reflection both spontaneous and systematic. The essence of education is liberating human intelligence (humanization).

Keywords : *education, institutions, organization*

1. PENDAHULUAN

Keharusan sejarah telah mengantarkan Indonesia memasuki era baru yang mempunyai makna sangat khusus yaitu menempatkan pendidikan dengan sadar di tangan masyarakat. Pada saat yang sama menyadari bahwa dari waktu ke waktu pendidikan memerlukan penataan baru sebagai konsekuensi perubahan sentralisasi manajemen pendidikan menjadi desentralisasi. Ketika memulai pelaksanaan desentralisasi pendidikan, tampaknya kita lebih memusatkan perhatian kepada wilayah permasalahan pendidikan yang lebih sempit dari yang kita pahami, padahal desentralisasi pendidikan bukanlah tujuan akhir. Pada dasarnya pendidikan senantiasa berperan merintis dan memantapkan kemajuan kehidupan suatu bangsa dan masyarakatnya. Oleh karena itu ruang lingkup pendidikan begitu luas dan terbuka, seluas dan seterbuka kehidupan di dunia yang tidak mengenal bingkai-bingkai pembatas

Salah satu factor yang sangat mempengaruhi kualitas penyelenggaraan pendidikan adalah organisasi atau lembaga penyelenggaraan pendidikan. Suatu lembaga dan organisasi pendidikan yang efektif dalam menyelenggarakan program pendidikan dan memberikan layanan belajar seringkali menjadi masalah pendidikan. Kenapa demikian? Karena masyarakat membutuhkan pelayanan yang cepat dan memperoleh manfaat sesuai dibutuhkannya. Tetapi dalam realisasinya selalu saja hal ini tidak diperoleh sebagaimana mestinya, bahkan di antara masyarakat ada yang menerima layanan pendidikan yang jelek seperti dalam pembelajaran di kelas yang dilaksanakan seadanya.

Ternyata setelah ditelusuri melalui berbagai hasil-hasil penelitian, menunjukkan bahwa pelayanan yang jelek tersebut antara lain disebabkan kebijaksanaan yang tidak tepat, proses pembelajaran tidak efektif, kemampuan profesional guru yang kurang, organisasi pendidikan yang kaku dan rumit, control pemerintah daerah yang kaku dan selalu melakukan intervensi, kuatnya dominasi eksekutif, lemahnya peran legislative, manajemen sentralistik dan tidak efektif pada dinas pendidikan ditandai birokrasi yang kaku dan rumit, inflesibilitas anggaran, manajemen terpecah, system organisasi yang kompleks di sekolah dan sebagainya.

Problematika ini berimplikasi pada proses manajemen pendidikan yang tidak efektif dan tidak efisien. Hal inilah yang menyebabkan mutu pendidikan rendah dan masyarakat merasa tidak puas atas layanan pendidikan yang diterimanya. Oleh karena itu menurut pandangan para ahli manajemen pendidikan, perlu ada pembahasan yang mendalam dan komprehensif melalui penelitian yang mendalam pula, untuk menemukan solusi yang tepat mengenai organisasi pendidikan yang efektif dalam memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat dan juga memberdayakan satuan pendidikan sesuai prinsip-prinsip otonomi dan pemberdayaan semua potensi yang terkait.

Untuk memenuhi tuntutan tersebut setelah melakukan kajian berbagai literature dan mengamati perkembangan yang actual, penulis tertarik mengkaji lebih mendalam mengenai organisasi pendidikan yang efektif dan dinamis. Kajian ini diarahkan pada desain organisasi yang medeskripsikan keefektifan organisasi pendidikan di provinsi dan kabupaten/kota untuk mencapai visi dan misi dalam suatu system desentralisasi pemerintahan. Sehingga dapat didiskusikan solusi yang mungkin dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai problematika organisasi pendidikan.

2. KAJIAN PUSTAKA

Organisasi (Reorganisasi) Pendidikan

Pada dasarnya untuk efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan program pendidikan dan kebijakan pendidikan dalam mencapai tujuan, tentu harus mengacu pada system pemerintahan dan aturan yang melandasinya. Salah satu hal mendasar dalam system pendidikan adalah kebijakan mengenai organisasi pendidikan. Oleh Pemerintah Republik Indonesia kebijakan mengenai organisasi pendidikan telah dilakukan yaitu reorganisasi (integrasi) organisasi pendidikan di daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai implementasi kebijakan otonomi daerah.

Kebijakan ini ditegaskan dalam (1) UU No.22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang telah disempurnakan menjadi UU no.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; (2) UU No.25 tahun 1999 yang telah disempurnakan menjadi UU No.33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah; (3) UUNo.2 tahun 1989 tentang sisitem pendidikan nasional yang disempurnakan menjadi UU No.20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional; (4) UU No.14 tahun 2005 tentang guru dan dosen; (5) PP No.19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan; dan (6) berbagai peraturan lainnya yang mengatur penyelenggaraan pendidikan.

Semua undang-undang dan peraturan ini akan mempengaruhi desain organisasi pendidikan baik pada tatar pemerintah maupun pada tatar satuan pendidikan. Untuk mempermudah pelayanan dan pengawasan kualitas pembelajaran dis ekolah, maka desain organisasi pendidikan pada pemerintahan pusat yaitu Departemen Pendidikan Nasional menurut Undang Undang tersebut di atas melakukan penyesuaian yang lebih focus pada standar pendidikan dan secara nasional mengoptimalkan pelayanan kebutuhan satuan pendidikan. Sedangkan tingkat provinsi dan kabupaten/kota mengukuhkan struktur organisasi dalam hal urusan maupun pelayanan pendidikan di daerah menjadi satu dalam pemerintah daerah yaitu dinas pendidikan dan satuan pendidikan.

Keinginan kuat melakukan perubahan dalam manajemen pendidikan dari sentralistik ke desentralistik dimaksudkan agar potensi daerah dapat dioptimalkan. Dalam kesempatan ini kajian mendalam berbagai problematika manajemen pendidikan adalah sebagai “alasan kuat” bagi penulis untuk melakukan kajian yang lebih mendalam tentang “organisasi pendidikan yang dinamis dalam memberdayakan satuan pendidikan”., sebagai “upaya memperkuat pemberdayaan organisasi pendidikan ke arah yang lebih professional dan dinamis di provinsi, kabupaten/kota, dan satuan pendidikan”.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskripsi kualitatif dengan mengumpulkan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Desain Organisasi Pendidikan

Dengan alasan ini menimbulkan keinginan yang kuat untuk mengkaji hal-hal berkaitan dengan (1) perubahan desain organisasi pendidikan sari sentralistik menjadi desentralistik pada pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota; (2) peran legislative sesuai kedudukan dan kewenangannya dalam

penyelenggaraan pendidikan di daerah; dan (3) implikasi kebijakan otonomi pendidikan dalam memberdayakan seluruh potensi institusi terkait secara sinergik dalam mengelola pendidikan secara optimal sesuai fungsi dan tanggungjawabnya.

Dalam implementasi kebijakan desentralisasi pendidikan, maka desain organisasi pendidikannya adalah yang mengedepankan pelayanan pada satuan pendidikan atau sekolah. Desain organisasi di provinsi, kabupaten/kota dan sekolah menggambarkan organisasi yang lebih berdaya. Agar organisasi pendidikan khususnya pada tatar satuan pendidikan lebih berdaya, maka perlu dilakukan perubahan mendasar dalam organisasi yang memberikan pelayanan kepadanya. Perubahan itu antara lain adalah perubahan dari pola birokratis sebagai pemberi petunjuk, menjadi pola pelayanan menerima masukan (input) dengan mengukuhkan organisasi pendidikan sebagai lembaga pelayanan pendidikan secara professional. Organisasi pendidikan pada pemerintah daerah yang dibutuhkan adalah organisasi yang dapat memberikan pelayanan kebutuhan teknis administrasi dan kebutuhan fungsional bagi penyelenggaraan pendidikan di sekolah.

Karakteristik pelayanan ini tentu bertitik tolak pada sifat organisasi sekolah yang menerapkan kodel manajemen berbasis sekolah dan memposisikan guru sebagai sumber daya professional serta menempatkan peran masyarakat sebagai pengguna jasa pendidikan secara seimbang. Prinsip dari manajemen berbasis sekolah adalah adanya otonomi sekolah yang menggambarkan adanya hak-hak otonom bagi sekolah-sekolah dan pemberdayaan potensi sekolah. Dalam penyelenggaraannya menampakkan secara jelas penerapan manajemen yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu pendekatan birokratis dari pemerintah daerah dan dinas pendidikan dalam memberikan layanan kepada sekolah sudah tidak relevan lagi.

Pelebagaan Pendidikan: Kumpulan orang dan Otoritas

Dalam era globalisasi saat ini pendidikan merupakan suatu syarat menuju modernisasi, yang begitu penting sehingga semua bangsa berlomba-lomba meningkatkan kualitas pendidikan. Pendidikan yang berkualitas menyangkut berbagai aspek, baik manusia, fasilitas, maupun biaya. Itu berarti , pendidikan hanya dapat terselenggara dengan baik bila individu, lembaga, struktur, sarana serta biaya saling menunjang. Lembaga sendiri telah lama dikenal karena manusia adalah makhluk social yang perlu melakukan kerjasama untuk dapat bekerja dengan baik, maka manusia memerlukan sebuah wadah yang disebut lembaga. Ada berbagai batasan atau pandangan yang dikemukakan para ahli yang satu samalainnya memiliki komponen-komponen yang pada dasarnya ada dalam setiap pengertian atau batasan lembaga. Definisi berikut didasarkan pada lima fakta yang umum terdapat pada setiap lembaga :

1. Organisasi selalu berisi orang-orang,
2. Orang-orang tersebut saling terlibat dan melalui cara-cara tertentu mereka itu saling berinteraksi.
3. Interaksi-interaksi tersebut selalu dilakukan secara teratur atau ditentukan oleh sejenis struktur.
4. Semua orang dalam organisasi mempunyai tujuan-tujuan pribadi dan beberapa diantaranya itulah mendasari tindakan-tindakan mereka. Setiap orang mengharapkan bahwa partisipasi mereka dalam organisasi akan membantu mencapai tujuan-tujuan individual.
5. Interaksi-interaksi tersebut dapat juga membantu mencapai tujuan-tujuan yang memiliki keterkaitan yang mungkin berbeda dari tetapi berhubungan dengan tujuan-tujuan pribadi.

Hal yang sama juga dikatakan sebenarnya oleh Prof. Dra. Anita Lie, M.A. Ed.D dalam sebuah wawancara “ banyak guru belum bebas! Terbelenggu! Bagaimana mereka bisa membebaskan anak didiknya?

Lebih jauh lagi pula disadari bahwa pendidikan di Indonesia di nilai tertinggal dibandingkan dengan di Negara-negara Asia lain, seperti Jepang, Korea selatan, Singapura, Malaysia dan Filipina.

Ketertinggalan itu diukur menurut komponen-komponen pendidikan seperti kurikulum, manajemen, tenaga kependidikan, kesiswaan dan kegiatan belajar mengajar. Kurikulum kita masih didominasi oleh substansi dan pendekatan lama yang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat sekarang. Manajemen pendidikan kita masih sangat tergantung pada pola-pola yang secara sentralistik diinstruksikan oleh pemerintah, dan belum secara jelas didasarkan atas realitas masyarakat yang riil. Tenaga-tenaga kependidikan kita, terutama yang di daerah-daerah masih menganut paham guru adalah pemilik dan penguasa pengetahuan dan kebenaran. Kegiatan belajar-mengajar masih didominasi oleh guru yang mengindoktrinasi berbagai informasi pengajaran.

Dinamika system pendidikan di Indonesia mungkin benar, dipengaruhi oleh selera para penentu kebijakan dalam bidang pendidikan namun perlu disadari bahwa selera penentu kebijakan dipengaruhi juga oleh Semangat Zaman (*Zeitgeist*) yang berkembang pada waktunya. Semangat Zaman ini dipahami sebagai paradigma yang mempengaruhi tata nilai dan tata hidup masyarakat dan membentuk sikap dan cara bertindak masyarakat terhadap realitas pada suatu masa tertentu. Sebaliknya, realitas sosial pada masa tertentu membentuk sikap dan cara bertindak masyarakat serta mempengaruhi tata nilai dan tata hidup masyarakat sehingga terjadi perubahan pada tataran paradigmatic.

Tujuan pelebagaan Pendidikan

Pendidikan bukanlah suatu prasyarat formal untuk mendapatkan ijazah atau gelar kesarjanaaan. Hakikat pendidikan terletak pada pendewasaan manusia, pengembangan diri, dan konstruksi kompetensi. Pendidikan merupakan proses yang bersifat instrumental untuk membantu seorang siswa mengembangkan dirinya menjadi manusia yang lebih dewasa atau matang. Pandangan ini didasarkan atas filsafat bahwa setiap individu manusia secara kodrati memiliki berbagai potensi diri. Segala potensi itu dapat dimekarkan atau diaktualisasi sesuai konteks social budayanya. Aktivitas pendidikan menstimulasi dan memfasilitasi perkembangan diri, baik menyangkut pengetahuan rasional, keseimbangan emosi dan afeksi, maupun kecakapan hidup. Dalam konteks itu, pendidikan memiliki fungsi pembebasan, yaitu pembebasan dari kepribadian yang belum matang atau yang belum dewasa. Atau dengan kata lain disebut pemanusiaan. Agar fungsi pemanusiaan itu efektif siswa tidak boleh tergantung dari buku hafalan. Seperti ditulis oleh filsuf Alfred North Whitehead dalam bukunya *The aim of Education*, seluruh aktivitas belajar seorang siswa tidak akan ada manfaatnya kalau ia masih terpaksa mati atau terus terkurung oleh buku-buku teks, catatan-catatan pelajaran, atau hafalan-hafalan yang ia miliki menjelang ujian-ujian. Semua itu harus dianggap sebagai sarana saja yang pada saatnya harus dianggap tidak lagi penting. Yang terpenting ialah kepribadian siswa berkembang, ia memiliki daya pengertian dan kemampuan berpikir secara mandiri, punya keseimbangan emosional, terbuka kepada sesama dan memiliki rasa tanggungjawab secara sosial, serta kecakapan-kecakapan yang perlu untuk bekerja dan mengembangkan diri lebih maju lagi. Dalam perspektif itulah kita mengerti perkataan klasik bahasa Latin “*Non scholae sed vitae discimus*”, kita belajar bukan untuk mendapatkan nilai di sekolah, melainkan untuk kehidupan yang seutuhnya. Pendidikan memikul tugas untuk mengembangkan kualitas-kualitas dasar yang dimiliki manusia; sedangkan belajar merupakan suatu proses panjang seumur hidup yang perlu ditempuh. Dinamika alam semesta dan perubahan sosial-budaya yang tak kunjung berakhir, menuntut manusia untuk tidak pernah berhenti belajar. Pengetahuan, kearifan, dan kecakapan yang perlu bagi kehidupan riil perlu selalu dibaharui dan dikembangkan. Hanya atas cara itu manusia dapat bertahan dalam dunia, tidak ditindas oleh perkembangan jaman, dan tidak hanyut oleh arus perubahan yang simpang siur.

Hakikat pendidikan seperti yang diuraikan di atas mewajibkan lembaga-lembaga pendidikan untuk menyelenggarakan kegiatan belajar-mengajar secara kontekstual menurut beberapa arti. Pertama, pemanusiaan seorang siswa sepatutnya berlangsung dalam konteks sosio-budayanya. Pandangan hidup, nilai-nilai dan kearifan lokal dari masyarakatnya diperhitungkan sebagai modal sosial yang tidak boleh

diabaikan dalam proses pendidikan. Atas cara itu, pengembangan diri seorang siswa memiliki akar sosial dan budaya. Pendidikan tidak mencabut siswa dari konteks masyarakatnya, melainkan memperkaya dan menumbuhkan apa yang secara kodrati dan kultural sudah ia miliki. Kedua, pendidikan diselenggarakan untuk menjawab harapan-harapan masyarakat. Apabila harapan itu ialah pembebasan masyarakat dari buta aksara, maka penyelenggaraan pendidikan harus difokuskan ke sana. Hal yang sama berlaku bagi program-program seperti pengembangan teknologi dan kecakapan yang dibutuhkan masyarakat setempat, begitu pula program tentang kajian dan penghayatan kearifan local. Ketiga, penyelenggaraan pendidikan dirancang untuk menjawab masalah-masalah dan tantangan yang berkembang dalam masyarakat. Atas cara itu, proses pendidikan membebaskan masyarakat dengan mengembangkan dalam generasi muda suatu kultur baru yang bebas dari praktek-praktek ketidakadilan.

Di sisi lain Profesor Driyarkara mencoba mengartikan pendidikan sebagai memanusiakan manusia muda. Dalam pengertian itu, maka pendidikan dimengerti sebagai proses membantu manusia muda untuk semakin menjadi manusia yang utuh dan sempurna. Menurut dia, manusia muda adalah sudah manusia, namun belum sempurna dan masih perlu disempurnakan. Lewat pendidikanlah, proses membantu orang muda itu terjadi.

Pendidikan yang berarti mengembangkan orang muda menjadi manusia penuh jelas mengandaikan bahwa kita mempunyai gagasan tentang manusia penuh. Apa manusia penuh itu? Apa artinya manusia sempurna? Maka pendidikan tidak pernah lepas dari siapa manusia itu, tidak lepas dari gagasan tentang manusia.

Bila orang mengerti manusia penuh sebagai pribadi yang mempunyai semua segi kemanusiaan seperti segi kognitif, emosi, spiritual, moral, fisis, artetis, maka jelas pendidikan perlu mengembangkan semua aspek itu secara menyeluruh. Bila kita memandang manusia penuh sebagai kesatuan badan dan jiwa, maka pendidikan berarti mengembangkan kesatuan itu. Oleh karena itu dalam pemanusiaan lembaga pendidikan secara khusus di papua, kita perlu bertanya bagaimana pendidikan itu sendiri harus dirancang bagi orang Papua. Tentang pendidikan di Papua; titik berangkat untuk proses pendidikan ini sangat berbeda dibandingkan dengan manusia bukan papua, yaitu Indonesia, karena pandangan dasar filsafati tentang manusia di kalangan papua lebih menekankan aspek individualitas dalam kebertubuhannya di tengah kosmos/ alam lingkungan, sedangkan manusia Indonesia lebih cenderung menekankan kolektivitas. Artinya setiap manusia adalah bagian dari suatu kelompok atau keseluruhan, dimana individualitas tidak boleh ditonjolkan, dan karenanya Mochtar Lubis menyoroti penekanan pada individualitas yang mencoba mengelak dan ketergantungan kolektivitas ini. Nah sasaran pemanusiaan untuk papua ini bertolak dari paham individualitas bertumbuh menuju ke paham personalitas yang intersubjektif, titik tolak ini berbeda dengan paham filsafati manusia non papua, walau sasaran pemanusiaan itu sama yaitu menuju personalitas yang intersubjektif. Dan justeru beda titik berangkat inilah yang membutuhkan bukan keseragaman kurikulum pendidikan untuk semua anak SD di Indonesia, karena pasti tidak akan relevan untuk anak Papua, tetapi komunitas pendidikan Papua sendiri harus mengolah suatu strategi pendidikan yang berasaskan pemanusiaan yang ideal.

Humanisasi Pendidikan

Dalam beberapa decade terakhir, lembaga pengelola pendidikan dasar dan menengah di papua berada dalam posisi kebingungan. Otonomi / kewenangan lembaga pengelola pendidikan swasta di dalam merancang system pendidikan berbasis manajemen mutu, dan kriteria kelulusan menjadi lemah bahkan tidak ada inisiatif. Lembaga pengelola tidak memiliki kewenangan di dalam menentukan standar minimal yang berlaku secara partikular namun diakui oleh Negara, tetapi justeru , ketergantungan pada kebijakan Negara di dalam mengatur system kurikulum, standar dasar kelulusan pada Negara masih tinggi. Hal yang terlihat justeru lembaga pengelola dapat melaksanakan kebijakan Negara. Negara dapat melahirkan keseragaman system, kurikulum, dan standar minimum norma-norma pendidikan sehingga

lembaga pengelola pendidikan dapat melaksanakan formalisasi pendidikan. Terkadang pula system dapat memaksa guru-guru sebagai pelaksana pendidikan dapat belajar memenuhi formalisasi dan keseragaman daripada menerapkan system dan norma baku yang menjadi kekhasannya di dalam mengajar, mendidik dan melatih siswa di lembaga pengelolanya sendiri-sendiri.

Sialnya, bahwa Negara tidak mampu menyiapkan system yang lebih strategis, termasuk buku-buku secara substansial dapat memuat aspek pengisian ilmu pengetahuan, penginspirasi kreativitas guru dan siswa tidak ditemukan di dalam buku-buku yang disusun dan disediakan oleh Negara. Penyusunan system kurikulum, penyiapan prasarana pendidikan, termasuk tenaga pendidik menjadi tidak lebih dari hanyalah sebuah proyek sehingga yang dikejar ialah pelaporan berdasarkan target waktu dan biaya penyediaan oleh pemerintah.

Keperihatinan lain adalah mencermati isu-isu utama dalam Otonomi Khusus Papua, yang antara lain: rendahnya mutu sumber daya manusia Papua, yang menurut UNDP, berada pada level terendah di antara provinsi-provinsi lain di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah penyakit yang terus menerus menyerang dan menggerogoti insan Papua yang hidup di bawah standard. Isu kedua, rendahnya angka partisipasi usia anak-anak dan remaja dalam pendidikan. Hal ini disebabkan karena rendahnya aksesibilitas pendidikan bagi penduduk Papua untuk memperoleh pendidikan bermutu.

Sebagai contoh, marilah kita mencoba memperhatikan system kurikulum kita. Apakah ada kurikulum yang tidak sejati, yang dibuat bukan sebagai sarana pemanusiaan? Antonio Gramsci (*The Prison Notebooks*) memberikan signal: manakala penguasa Negara menciptakan hegemoni kekuasaan melalui jalur dan model pendidikan yang dipaksakan kepada rakyatnya. Hegemoni lewat jalur kultural tersebut akan terus menyebar dan memperluas jangkauannya dalam relung kehidupan sebesar dan sekecil apa pun. Cara berpikir dan bertindak rakyat akan terdominasi hal-hal yang disebarpaksakan oleh aparat negara atau pejabat pemerintah dalam bentuk kebijakan dan sistem pendidikan yang tidak melibatkan dan jelas-jelas menindas pemanusiaan utuh integral rakyat.

Peran negara memang tidak dapat dipisahkan dalam proses pendidikan. Negara melestarikan kekuasaannya melalui politik kebudayaan (*cultural politics*) yang disalurkan melalui lembaga-lembaga pendidikannya. Oleh sebab itu, dalam pendidikan tersalur kemauan-kemauan politik atau sistem kekuasaan dalam suatu masyarakat. Biasanya, hal tersebut tidak disadari dalam suatu masyarakat. Meskipun demikian kekuasaan politik secara langsung seringkali berada dan merasuk dalam sistem pendidikan dengan bentuk objektif atau terang-terangan dan subjektif atau secara tidak disadari yang dikenal sebagai "hidden curriculum".

Lagi pula, celaknya kurikulum yang berlaku dalam suatu negara sering digunakan sebagai sarana indoktrinasi dari suatu sistem kekuasaan. Biasanya para pendidik dan masyarakat luas, tidak menyadari apa sebenarnya peranan kurikulum di dalam proses pembelajaran peserta didik. Menurut Bourdieu dan Passeron, setiap tindakan pedagogis yang bertujuan untuk mereproduksi kekuasaan dapat disebut kekerasan simbolis yang sah. Kekuatan kekerasan ini berasal dari hubungan kekuasaan yang sesungguhnya dan yang disembunyikan oleh kekuatan pedagogis.

Dunia pendidikan memang seringkali menganggap bahwa kurikulum adalah soal teknis belaka. Tetapi sebenarnya berbicara tentang kurikulum adalah berbicara tentang sumber-sumber kekuasaan dalam dunia pendidikan dan manusianya. Kurikulum adalah program dan isi dari suatu sistem pendidikan, yang berupaya melaksanakan proses akumulasi ilmu pengetahuan antargenerasi dalam suatu masyarakat. Dalam sebuah masyarakat yang homogen, masalah kurikulum tidak terlalu merisaukan, namun dilihat dari konteks masyarakat yang majemuk kurikulum adalah pertarungan antarkekuasaan yang hidup dalam suatu masyarakat. Kelompok masyarakat yang dominan akan mempertahankan kurikulum untuk mempertahankan dominasinya melalui sistem persekolahan. Semua aspek kurikulum sudah diatur begitu rupa sesuai dengan proses domestifikasi, yaitu proses penjinakan dengan mematikan kreativitas dan menjadikan peserta didik sebagai "robot-robot" yang sekedar

menerima transmisi nilai-nilai kebudayaan yang ada. Hasil proses domestifikasi bukanlah pembebasan, melainkan pembodohan (stupidifikasi). Proses domestifikasi dan stupidifikasi itu masih sering ditambah lagi dengan proses komodifikasi yang memunculkan kapitalisme pendidikan. Pendidikan tidak diarahkan untuk kepentingan rakyat banyak tetapi diarahkan agar menguntungkan secara ekonomis segelintir elit yang didukung birokrasi pendidikan. Terjadinya komodifikasi dalam dunia pendidikan sudah sejak tahun 1992 dinyatakan oleh Bourdieu. Bourdieu mengingatkan dunia tentang perjalanan suram yang akan melanda bidang pendidikan. Berkibarnya neokonservatisme politik dan neoliberalisme ekonomi membawa berkah finansial kepada tuan besar modal, tetapi kinerjanya bisa meluluhlantakkan berbagai rajutan institusional yang menyangga hidup bersama komunitas suatu bangsa.

Melalui proses pendidikan seperti itulah generasi muda di Papua dibentuk oleh sistem pendidikan yang mengacu pada politik etatisme. Dilihat dari sistem politik yang digunakan memang tidak ada yang salah dari sistem pendidikan yang diterapkan. Di setiap negara otoriter di mana pun selalu tidak memberi kemungkinan tumbuhnya pemikiran yang kritis terhadap kekuasaan. Jalur pendidikan dipakai sebagai instrumen untuk mengarahkan kemana harusnya masyarakat berpikir, sehingga daya-daya potensi manusiawi rakyat tidak tumbuh, apalagi berkembang.

Dengan demikian, Pendidikan telah menjalani proses bukan lagi sebagai laku pembudayaan, tetapi lebih sebagai kepentingan politik di satu sisi dan di sisi yang lain adalah kepentingan ekonomi. Dengan demikian jika orang masuk ke lorong pendidikan, ia tidak menemukan proses pencerdasan manusiawi yang memerdekakan, tetapi justru manusia menjadi terasing dari lingkungannya. Pendidikan sekedar sarana untuk mengisi lowongan pekerjaan, tidak peduli apakah jenis formasi yang ditempatinya itu sesuai dengan disiplin ilmu yang dipelajari atau tidak; belajar pertama-tama bukan bagaimana mengelola penalaran dan mengembangkan daya-daya kemanusiaan tetapi agar bagaimana segepok materi hapalan masuk ke botol kosong para peserta didik supaya mendapatkan naik kelas dan angka raport yang baik. Tidak mengherankan bila ideologi Nilai Ebtanas Murni (NEM) dan penguasaan hapalan material ala 'cerdas cermat' dan 'Who want to be Millionaire' menjadi acuan dan ajang kompetisi.

5. KESIMPULAN

Mengakhiri hal tersebut di atas, perlu kita pahami pandangan tentang pendidikan. Pendidikan adalah seluruh praksis kehidupan serta proses-proses peristiwa yang disertai refleksi baik spontan maupun sistematis. Esensi pendidikan adalah pencerdasan manusiawi yang memerdekakan (pemanusiaan). Pendidikan menghantar dan menolong peserta didik untuk mengenali dan mengembangkan potensi-potensi dirinya agar menjadi manusia yang mandiri, dewasa, dan utuh; manusia merdeka sekaligus peduli dan solider dengan sesama manusia lain dalam ikhtiar meraih kemanusiaan yang semakin sejati, dengan jati diri dan citra diri yang semakin utuh, harmonis, dan integral. Pendidikan bermekanisme belajar seumur hidup bersama sesama manusia dan semesta alam raya, sehingga peserta didik mempunyai sikap dasar "seluruh masyarakat dan semesta raya adalah sekolah, semua orang adalah guruku". Pencerdasan yang memberdayakan tersebut mempunyai fungsi sangat khusus untuk rakyat miskin, agar tidak terus menerus menjadi mangsa para kaya dan kuasa. Maka dalam bidang pendidikan dan pengajaran maupun kurikulum pun kita perlu berpihak pada yang miskin sebab dalam konteks hubungan persaingan antara yang kaya-kuasa dan yang miskin-tertindas pendidikan dan pengajaran beserta kurikulum dan perangkat pendidikan lainnya akan mudah sekali bisa mengabdikan kepada kepentingan yang kaya-kuasa daripada yang miskin-tertindas. Selain itu, pencerdasan manusiawi sebagai laku pembudayaan yang memerdekakan lewat pendidikan juga perlu dilakukan terhadap seluruh kehidupan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Prof.Dr. Abdul Azis Wahab, M.A., *Anatomi Organisasi dan Kepemimpinan Pendidikan* (Hicks dan Gullett, 1976, 22), UPI-Alfabeta, Bandung, 2006.
- [2] Prof. Dra. Anita Lie, M.A. Ed.D, *Esensi Pendidikan adalah Membebaskan*, dalam *Educare*, No.1/V/ April 2008.
- [3] Whitehead Alfred North, *The Aim of Education*, New York, Macmilan, 1957.
- [4] Henri A. Giroux dalam pengantar buku Paulo Freire, *Politik Pendidikan*, (Yogyakarta: {Pustaka Pelajar, 1999).
- [5] Michael W. Apple, *Ideology and Curriculum*, (London: Routledge dan Kegan Paul, 1979).
- [6] Pierre Bourdieu dan J.C Passeron, *Reproduction in Education, Society and Culture*, (London: Sage Publication, 1977),
- [7] Pierre Bourdieu, *The Field of Cultural Production*, (Columbia: Columbia University Press, 1993)
- [8] Michael W. Apple, *Education and Power*, (New York: Routledge, 1995).
- [9] Ignas Kleden, *Masyarakat dan Negara, Sebuah Persoalan*, (Magelang: Indonesiatera, 2004).
- [10] Francis Wahono, *Kapitalisme Pendidikan, Antara Kompetisi dan Keadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Insist Press, dan Cindelarar, 2001).
- [11] B. Herry-Priyono, *Kompas*, 27 April 2004.